



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

# FORUM KONSULTASI PUBLIK

KPTIK-BMN Makassar

Makassar, 17 Mei 2024



AULIA, S.I.P., M.SI.M.



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

# PENDAHULUAN

**Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara (KPTIK-BMN) Makassar** adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.



**KPTIKBMNMAKASSAR**

KPTIK-BMN Makassar mempunyai tugas melaksanakan **pengelolaan TIK, BMN dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)**.



# LATAR BELAKANG

**Standar Pelayanan** merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian yang bersifat perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan serta monitoring dan evaluasi kebijakan bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Mekanisme Penerapan Standar Pelayanan:

- Penyusunan Rancangan Standar Pelayanan
- Penetapan Standar Pelayanan
- Penerapan Standar Pelayanan





# LATAR BELAKANG

**Forum Konsultasi Publik** yang selanjutnya disingkat FKP adalah kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik.

Hasil dari FKP akan menjadi salah satu dasar dalam penyusunan usulan Standar Pelayanan.





# KANTOR PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (KPTIK) BARANG MILIK NEGARA (BMN)

- PERMEN KEU RI NO. 53/PMK.01/2011 (ORGANISASI DAN TATA KERJA KPTIK BMN)
- PERMEN KEU RI NO. 230/PMK.01/2019 (ORGANISASI DAN TATA KERJA KPTIK BMN)

DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DAN BARANG MILIK NEGARA , KANTOR PENGELOLAAN TIK DAN BMN MENYELENGGARAKAN FUNGSI:

1. Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
2. Pelaksanaan Inventarisasi, Penilaian dan Pemberdayaan Barang Milik Negara;
3. Pengelolaan Gedung Keuangan Negara, dan;
4. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha, Keuangan, Kepegawaian dan Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan serta Akuntabilitas Kinerja.

# LOKASI DAN WILAYAH KERJA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 230/PMK.01/2019  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR  
PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN  
KOMUNIKASI DAN BARANG MILIK NEGARA

NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA  
KANTOR PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DAN BARANG MILIK NEGARA

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Kantor Pengelolaan TIK dan BMN Medan	Medan	Meliputi wilayah Sumatera, termasuk: 1. GKN Banda Aceh 2. GKN Medan 3. GKN Palembang
2.	Kantor Pengelolaan TIK dan BMN Semarang	Semarang	Meliputi wilayah Jawa Tengah, Banten, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta, termasuk: 1. GKN Banten 2. GKN Semarang I 3. GKN Semarang II 4. GKN Yogyakarta 5. GKN Bandung
3.	Kantor Pengelolaan TIK dan BMN Surabaya	Surabaya	Meliputi wilayah Jawa Timur dan Kalimantan, termasuk: 1. GKN Surabaya I 2. GKN Surabaya II

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
			3.GKN Balikpapan
4.	Kantor Pengelolaan TIK dan BMN Denpasar	Denpasar	Meliputi wilayah Bali dan Nusa Tenggara, termasuk: 1.GKN Denpasar I 2.GKN Denpasar II 3.GKN Singaraja 4.GKN Kupang
5.	Kantor Pengelolaan TIK dan BMN Makassar	Makassar	Meliputi wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua, termasuk: 1.GKN Makassar 2.GKN Manado 3.GKN Mamuju 4.GKN Ambon 5.GKN Biak 6.GKN Sorong
			7.GKN Jayapura 8.GKN Manokwari

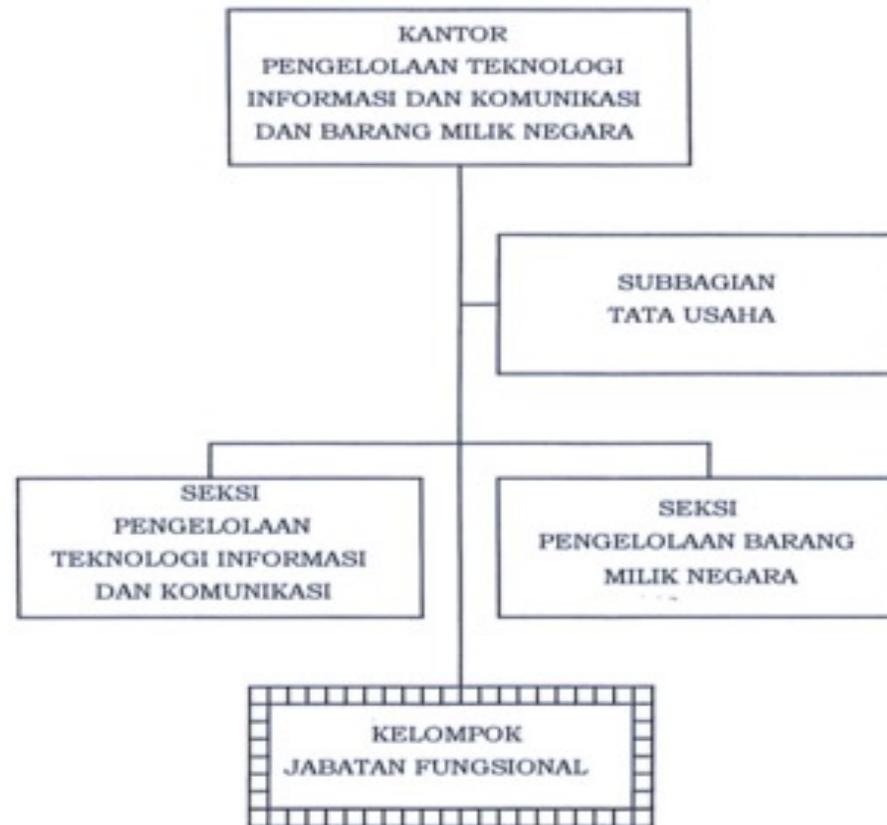
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

# PERMEN KEU RI NO. 230/PMK.01/2019 (ORGANISASI DAN TATA KERJA KPTIK BMN)

## BAGAN ORGANISASI KANTOR PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DAN BARANG MILIK NEGARA





# LAYANAN KPTIK-BMN MAKASSAR

## TIK



Layanan  
Infrastruktur TIK



Layanan  
Dukungan TIK



Layanan Akun  
Kementerian Keuangan

## TU



Layanan  
Protokoler



Layanan  
Kresetariatan

## BMN



Layanan  
Peminjaman BMN



Layanan  
Sewa BMN



Layanan  
Perbaikan ASET



Layanan Penyediaan  
Sarana Prasarana



Layanan Penyediaan  
Permintaan Barang

LPSE

Layanan Konsultasi  
terkait Registrasi dan Verifikasi  
Aplikasi Layanan Pengadaan  
Secara Elektronik

LPSE

Layanan Registrasi dan Verifikasi  
Aplikasi Layanan Pengadaan  
Secara Elektronik



# LAYANAN SEWA BMN

Layanan Sewa BMN merupakan pemberian layanan pemanfaatan BMN KPTIK-BMN Makassar oleh Pihak Ketiga dalam jangka waktu tertentu dengan biaya yang telah ditentukan.

Layanan ini dikategorisasikan menjadi **Ringan**, **Sedang**, dan **Berat**.

NO	KATEGORISASI LAYANAN BMN	NORMA WAKTU PENYELESAIAN
1	Ringan	$\leq 1$ Hari
2	Sedang	$> 1$ Hari s.d. $\leq 7$ Hari
3	Berat	$> 7$ Hari

# PUBLIKASI STANDAR PELAYANAN

01.

Persyaratan

02.

Sistem, Mekanisme,  
Prosedur

03.

Jangka Waktu  
Penyelesaian

04.

Biaya / Tarif

05.

Produk Pelayanan

06.

Penanganan, Pengaduan,  
Saran dan Masukan

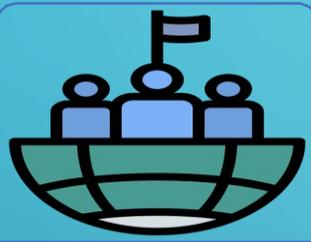
# LAYANAN SEWA BMN

## Pihak Yang Dapat Menyewa BMN



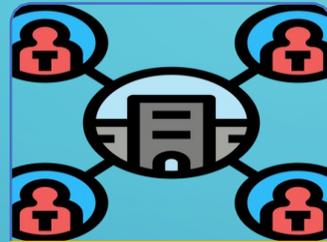
BUMN/ BUMD

01.



Swasta

02.



Badan Hukum  
Lainnya

03.

- 1) Perorangan
- 2) Persekutuan Perdata
- 3) Persekutuan Firma
- 4) Persekutuan Komanditer
- 5) Perseroan Terbatas
- 6) Yayasan atau
- 7) Koperasi

## Objek Sewa BMN: Tanah dan/atau Bangunan

Per  
Tahun

Per  
Bulan

Per  
Hari

Per  
Jam



# LAYANAN SEWA BMN

**Jangka Waktu Pelayanan:**  
**20 Hari Kerja** setelah dokumen persyaratan lengkap

## Dokumen Persyaratan

- 1) Identitas calon penyewa
- 2) Jenis dan kuantitas BMN yang akan disewa
- 3) Peruntukan penyewaan
- 4) Jangka waktu Sewa
- 5) Periodesitas Sewa
- 6) Rencana penerusan Sewa, apabila ada, dan
- 7) Harga penawaran

## Dokumen Pendukung

- 1) Fotokopi Surat Izin Usaha/Tanda Izin Usaha
- 2) Fotokopi NPWP
- 3) Fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan
- 4) Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan
- 5) Fotokopi KTP calon penyewa
- 6) Surat Pernyataan dari calon penyewa

**TERIMA KASIH**